



**RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 diawali dari Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 Hal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Serta surat Edaran Bupati Malang, tanggal 8 Februari 2019, Nomor: 050/1466/35.05.202/2019, Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021. Tema Pembangunan Tahun 2020 adalah **“Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur , Potensi Pariwisata dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan”**. Kaitan tema tersebut dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah berperandalam mendukung Misi ke-4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan pengembangan ekonomi dilingkungan masyarakat. Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2021, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah

Tahun 2016-2021, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Di tingkat Dinas/Badan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/986/KEP/35.07.205/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.205/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/119/KEP/35.07.205/2019 tentang Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2020;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan di tahun 2020; dan
3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di tahun 2020 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
- 1.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu. Pada dasarnya Tahun 2018 merupakan tahun yang bisa dikatakan sangat mendukung terlaksanakannya program serta kegiatan secara baik dan terstruktur. Pada Tahun 2018 ini beberapa inovasi terkait aplikasi Pembayaran Pajak Daerah mulai di kembangkan serta dilakukan sosialisasi dan uji coba langsung terhadap masyarakat. Salah satu contoh aplikasi yang mulai di kembangkan pada tahun 2018 ini adalah aplikasi SIPANJI ( Sistem Penerimaan Pajak Mandiri) yang di rintis oleh Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD), aplikasi ini meliputi aplikasi Pembayaran dan Pendaftaran Pajak Daerah secara online. Namun tentunya dalam pelaksanaan aplikasi ini masih diperlukan banyak evaluasi.

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Analisis ataskendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada **tabel 2.1** berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	2	1	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>19.97%</b>	<b>99,88%</b>	<b>20%</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>		
4	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	55000 buah	15000 buah	16000 buah	1600 buah	16000 buah	100	12000 buah	43000 buah	78.18
4	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	3 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60.00
4	2	1	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	500 jenis	85 jenis	83 jenis	25 jenis	83 jenis	100	57 jenis	225 jenis	45.00

4	2	1	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	21100 HOK	4000 HOK	7780 HOK	300 HOK	7780 HOK	100	7780 HOK	19560 HOK	92.70
4	2	1	6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	14800 OB	230 OB	3700 OB	230 OB	3700 OB	100	3700 OB	7630 OB	51.55
4	2	1	7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2400 HOK	150 HOK	790 HOK	25 HOK	780 HOK	98.73	790 HOK	1730 HOK	72.08
4	2	1	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	250 jenis	40 jenis	11 jenis	24 jenis	11 jenis	100	11 jenis	62 jenis	24.80
4	2	1	9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	575 jenis	115 jenis	73 jenis	50 jenis	73 jenis	100	58 jenis	246 jenis	42.78
4	2	1	10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	520 HOK	100 HOK	238 HOK	0 HOK	238 HOK	100	238 HOK	576 HOK	110.77
4	2	1	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	150 jenis	15 jenis	67 jenis	15 jenis	67 jenis	100	30 jenis	112 jenis	74.67
4	2	1	12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	75 jenis	10 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	100	2 jenis	14 jenis	18.67
4	2	2		<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>		<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>60.00</b>
4	2	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	70 bangunan	10 bangunan	14 bangunan	3 bangunan	14 bangunan	100	14 jenis	38 bangunan	54.29

4	2	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	320 unit	64 unit	173 unit	20 unit	173 unit	100	64 jenis	301 jenis	94.06
4	2	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	560 jenis	112 jenis	47 jenis	14 jenis	47 jenis	100	47 jenis	206 jenis	36.79
4	2	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	100 jenis	20 jenis	20 jenis	0 jenis	20 jenis	100	20 jenis	60 jenis	60.00
4	2	2	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	100 jenis	20 jenis	14 jenis	0 jenis	14 jenis	100	20 jenis	54 jenis	54.00
4	2	2	6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	57 unit	12 unit	40 unit	0 unit	40 unit	100	4 unit	56 unit	98.25
					Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	10 unit	0	7 unit		7 unit	100	1 unit	8 unit	80.00
4	2	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	190 jenis	24 jenis	22 jenis	0 jenis	22 jenis	100	50 jenis	96 jenis	50.53
4	2	3		<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>		<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>60</b>
4	2	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1340 stel	0 stel	525 stel	0 stel	525 stel	100,00	340 stell	865 stell	65
4	2	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga	1670 stel	330 stel	800 stel	0 stel	800 stel	100	340 stell	1470 stell	88

4	2	4		<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>20%</b>		<b>20.2%</b>	<b>101</b>	<b>25%</b>	<b>70.2%</b>	<b>70.2</b>
4	2	4	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	400 orang	5 orang	200 orang	0 orang	202 orang	101	100 orang	307 orang	77
4	2	5		<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>		<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>55</b>
4	2	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	488 dokumen	110 buku	48 dokumen	0 dokumen	48 dokumen	100	48 dokumen	206 buku	42.21
4	2	5	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	472 buku	100 buku	4 buku	0 buku	4 buku	100	4 buku	108 buku	22.88
4	2	5	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	162 buku	12 buku	2 buku	0 buku	2 buku	100,00	2 buku	16 buku	9.88
4	2	6		<b>VI. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD</b>	<b>Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti</b>	<b>400%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>		<b>33.67%</b>	<b>150.67</b>	<b>25%</b>	<b>58.67%</b>	<b>58.67</b>
4	2	6	1	Pelayanan dan penelitian BPHTB	Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani	100%	0	100%	98 wajib pajak	176%	176	100%	276%	276
4	2	6	2	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD	48 buku	0	12 buku	22 buku	12 buku	100	12 buku	24 buku	50

4	2	6	3	Verifikasi dan Validasi	Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	100%	0	100%		176%	176	100%	276%	276
4	2	7		<b>VII. Program dan Peningkatan Pelayanan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>Tingkat layanan PBB</b>	<b>400%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>		<b>25.47%</b>	<b>101.87</b>	<b>25%</b>	<b>50.47%</b>	<b>50.47</b>
4	2	7	1	Optimalisasi Penerimaan PBB - P2	Persentase penerimaan PBB - P2	400%	0	100%		100%	100	100%	200%	50
4	2	7	2	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB - P2	5505276 op	0	1376319 OP	242370 op	1392226 OP	101	1376319 OP	2768545 OP	50
4	2	7	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	320 desa	0	390 desa	16 desa	390 desa	100	390 desa	390 desa	122
4	2	7	4	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2	4 aplikasi SIM PBB	0	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	100	1 aplikasi SIM PBB	2 aplikasi SIM PBB	50
4	2	7	5	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan	5505276 op	0	1376319 OP	344080 OP	1515390 OP	110	1376319 OP	2891709 OP	53

4	2	7	6	Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	132 desa	0	33 desa	1 desa	33 desa	100	33 desa	66 desa	50
4	2	8		<b>VIII. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>		<b>25%</b>	<b>100</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>50</b>
4	2	8	1	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih	10 sektor pajak	0	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	100	10 sektor pajak	10 sektor pajak	100
4	2	8	2	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan	76 dokumen	0	19 dokumen	24 dokumen	19 dokumen	100	18 dokumen	37 dokumen	49
4	2	8	3	Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat	120 pembinaan	0	31 pembinaan		31 pembinaan	100	0	31 pembinaan	26
4	2	8	4	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 WP	0	30 WP	3 WP	30 WP	100	30 WP	60 WP	50
4	2	8	5	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah operasi gabungan yang dilakukan	16 kegiatan	0	14 kegiatan	2 kegiatan	14 kegiatan	100	4 kegiatan	18 kegiatan	113
4	2	8	6	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	16 kegiatan	0	14 kegiatan	12 kegiatan	14 kegiatan	100	4 kegiatan	18 kegiatan	113
4	2	8	7	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT	48 kegiatan	0	12 kegiatan	4 kegiatan	12 kegiatan	100	12 kegiatan	24 kegiatan	50

4	2	9		<b>IX. Program Peningkatan Pelayanan Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>		<b>25%</b>	<b>100</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>50</b>
4	2	9	1	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	19000 SKPD	0	15000 SKPD	900 SKPD	15000 SKPD	100	16538 SKPD	31538 SKPD	166
4	2	9	2	Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 Desa	0	378 desa	378 desa	378 desa	100	378 desa	378 desa	100
4	2	9	3	Penyusunan target dan laporan perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	864 laporan	0	216 laporan	19 laporan	216 laporan	100	216 laporan	432 laporan	50
4	2	9	4	Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda - Benda Berharga	1293 WP	0	300 WP	33 wajib pajak	300 WP	100	331 WP	631 WP	49
4	2	9	5	Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi	118 OP	0	102 OP	102 op	102 OP	100	112 OP	112 OP	95
4	2	9	6	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	1293 WP	0	300 WP	24 WP	300 WP	100	331 WP	631 WP	49
4	2	9	7	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang di hasilkan	12 dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	0	3 dokumen	25



Dari Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, diketahui bahwa perkiraan realisasi Capaian Target Renstra untuk semua Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang realisasi capaian program maupun tingkat capaian realisasi target Renstra Perangkat Daerah sudah terealisasi dengan sesuai dengan target, khususnya untuk Program dan Kegiatan baru yang dilaksanakan mulai tahun 2018, Pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga ada perubahan kegiatan serta nomenklatur program/kegiatan yang tidak bisa tercapai dengan maksimal. Setelah dilakukan penyesuaian program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang memiliki 9 Program yaitu 5 program rutin dan 4 program utama Badan Pendapatan, dengan total kegiatan 41 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sampai dengan akhir Tahun 2018 dengan pencapaian target kinerja sebesar 100 % adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 kegiatan;
5. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB, terdiri dari 7 kegiatan;
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan.

Sedangkan Program/kegiatan dengan capaian lebih dari 100 % adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan, dengan capaian sebesar 105%;
2. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdiri dari 6 kegiatan, dengan capaian sebesar 101,87%; dan
3. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan capaian sebesar 151%.

## 2.2. Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki obyek pelayanan langsung terhadap masyarakat diantaranya dengan wajib pajak yaitu:

- a. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak daerah, wajib retribusi dan menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain pendapatan kepada UPT;
- d. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
- e. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak, Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) yang melebihi masa jatuh temponya;
- f. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan banding Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- g. Pelaksanaan pelayanan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- h. Pelaksanaan pelayanan pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- i. Pelaksanaan pelayanan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- j. Pelaksanaan pelayanan pembatalan ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
- k. Pelaksanaan pelayanan pengisian dan penghitungan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. Pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- m. Pelaksanaan penelitian verifikasi lapangan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- n. Pelaksanaan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- o. Pelaksanaan pembetulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- p. Pelaksanaan pembayaran kembali kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- q. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan retribusidaerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- r. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah;
- s. Pelaksanaan laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyeterannya ke Kas Daerah;
- t. Koordinasi dan melayani permohonan keberatan dan banding;
- u. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah juga memiliki peran yang sama dengan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang PBB – P2 tentang pelayanan langsung terhadap Wajib Pajak, yaitu:

- a. Menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan dari Bank Persepsi dengan Berita Acara;
- b. Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutama dari Wajib Pajak;
- c. Menyerahkan Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk Wajib Pajak yang Pajak Bumi dan Bangunannya telah dibayar kepada Wajib Pajak;
- d. Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas Pemungut.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2017-2018 juga dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.2**. Pada tabel 2.2 juga disajikan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

## Kabupaten Malang

NO	INDIKATOR	SPM / Standar	IKK /	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Nasional	IKU	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	7	8			9	10	11	12	13
<b>Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah</b>												
1	Persentase tingkat kemandirian Keuangan Daerah	-	-	13.30%	13.47%	13.63%	13.63%	15.32%	13,47%*	13.63%	13.63%	
2	Persentase penyelesaian ajuan layanan PBB	-	-	100%	-	-		145.21%	-	-		
<b>Indikator Program - Program Badan Pendapatan Daerah</b>												
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	99.88%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	101%	100%	100%	100%	

5	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	-	-	100%	100%	100%	100%	150.67%	100%	100%	100%	
8	Tingkat layanan PBB	-	-	100%	100%	100%	100%	101.87%	100%	100%	100%	
9	Tingkat pengawasan penerimaan daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Tingkat penerimaan pajak Non PBB dan Non BPHTB	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>Indikator Kegiatan - Kegiatan Badan Pendapatan Daerah</b>			-									
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	-	-	16000 buah	16.000 buah	16.000 buah	16.000 buah	16000 buah	16.000 buah	16.000 buah	16.000 buah	
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Jumlah barang cetakan yang disediakan	-	-	83 jenis	83 jenis	83 jenis	83 jenis	83 jenis	83 jenis	83 jenis	83 jenis	
4	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	-	-	7780 HOK	7780 HOK	7500 HOK	7500 HOK	7780 HOK	7780 HOK	7500 HOK	7500 HOK	
5	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	-	-	3700 OB	3700 OB	3700 OB	3700 OB	3700 OB	3700 OB	3700 OB	3700 OB	
6	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	-	-	790 HOK	790 HOK	790 HOK	790 HOK	780 HOK	790 HOK	790 HOK	790 HOK	
7	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	

8	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	-	-	73 jenis	73 jenis	73 jenis	73 jenis	58 jenis	73 jenis	73 jenis	73 jenis	
9	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	-	-	238 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	238 HOK	240 HOK	240 HOK	240 HOK	
10	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	-	-	67 jenis	67 jenis	67 jenis	30 jenis	67 jenis	67 jenis	67 jenis	30 jenis	
11	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
12	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	14 bangunan	
13	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	173 unit	173 unit	173 unit	173 unit	173 unit	173 unit	173 unit	173 unit	
14	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	
15	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	-	-	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	14 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	14 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	
17	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 baru yang diadakan	-	-	40 unit	0	2 unit	0	40 unit	0	2 unit	0	
18	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan	-	-	7 unit	0 unit	0 unit	0 unit	7 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
19	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	22 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	22 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	
20	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga	-	-	525 stel	330 stell	330 stell	0 stell	525 stel	330 stell	330 stell	0 stell	
21	Jumlah penyediaan pakaian dinas	-	-	800 stel	0	0	0	800 stel	0	0	0	

22	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	202 orang	200 orang	200 orang	200 orang	
23	Jumlah Laporan Tahunan	-	-	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	
24	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	-	-	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	2 buku	4 buku	4 buku	4 buku	
25	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
26	Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani	-	-	100%	100%	100%	100%	176%	100%	100%	100%	
27	Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD	-	-	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	
28	Pengajuan Permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB dan BUMD yang terverifikasi dan validasi	-	-	100%	100%	100%	100%	176%	100%	100%	100%	
29	Presentase penerimaan PBB P2	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Jumlah penerbitan SPPT PBB P2 yang diterbitkan	-	-	1376319 OP	1.376.319 OP	1.376.319 OP	1.376.319 OP	1392226 OP	1.376.319 OP	1.376.319 OP	1.376.319 OP	
31	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	-	-	390 desa	390 desa	390 desa	390 desa	390 desa	390 desa	390 desa	390 desa	
32	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB	-	-	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi sim PBB	1 aplikasi sim PBB	1 Aplikasi SIM PBB	1 aplikasi SIM PBB	1 aplikasi sim PBB	1 aplikasi sim PBB	1 Aplikasi SIM PBB	

33	Jumlah kegiatan Pekan Panutan Pajak / jumlah sppt PBB P2 yang di distribusikan	-	-	1376319 OP	1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP	1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP	1 kegiatan pekan panutan pajak/1.376.319 OP	1515390 OP	1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP	1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP	1 kegiatan pekan panutan pajak/1.376.319 OP	
34	Juumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data /Jumlah desa yang dilakukan pemeliharaan Basis Data	-	-	33 desa	2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan	2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan	33 Desa	33 desa	2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan	2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan	33 Desa	
35	Jumlah Penagihan Pajak Non PBB yang di tagih	-	-	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	10 sektor pajak	
36	Jumlah monitoring dan evaluasi pajak daerah yang dilaksanakan	-	-	19 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	19 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	
37	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan pajak daerah di 7 UPT	-	-	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	31 pembinaan	
38	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan	-	-	30 WP	25 OP	25 OP	30 WP	30 WP	25 OP	25 OP	30 WP	
39	Jumlah operasi gabungan penertiban pajak daerah	-	-	14 kegiatan	14 kali	14 kali	4 kegiatan	14 kegiatan	14 kali	14 kali	4 kegiatan	
40	Jumlah Pemeriksaan pajak daerah ke wajib pajak	-	-	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	4 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	4 kegiatan	
41	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan rekonsiliasi piutang pajak di & 7 UPT	-	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
42	Jumlah penghitungan penetapan penerbitan dan pendistribusian surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta pemeliharaan sistem aplikasi	-	-	15000 SKPD	15000 SKPD	15000 SKPD	19.000 SKPD	15000 SKPD	15000 SKPD	15000 SKPD	19.000 SKPD	



43	Jumlah Desa yang mendapatkan bagi hasil pajak dan Retribusi	-	-	378 desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	
44	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	-	-	216 laporan	216 laporan	216 laporan	216 Laporan	216 laporan	216 laporan	216 laporan	216 Laporan	
45	Jumlah Permintaan Porforasi dan pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	-	-	300 WP	300 WP	300 WP	347 WP	300 WP	300 WP	300 WP	347 WP	
46	Jumlah Objek pajak yang dilakukan insentififikasi dan Ekstensifikasi	-	-	102 OP	102 OP	102 OP	118 OP	102 OP	102 OP	102 OP	118 OP	
47	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan objek pajak	-	-	300 WP	300 WP	300 WP	347 WP	300 WP	300 WP	300 WP	347 WP	
48	Jumlah RAPERDA dan RAPERBUB yang di hasilkan	-	-	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	-	-	-	

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Badan Pendapatan Daerah;
- c. Kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan UPTD Pendapatan.

Pada awal Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah telah merintis beberapa inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan proses penerimaan Pendapatan Daerah. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah, selain itu di harapkan bahwa dengan adanya aplikasi dan inovasi ini dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran. Dengan di dukung oleh beberapa Bank Daerah maupun Bank Nasional, Badan Pendapatan Daerah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Daerah secara bertahap dan efisien. Namun dalam praktiknya tentunya masih ada beberapa kendala teknis yang di alami dalam pelaksanaan aplikasi Pajak Daerah maupun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang sebagai berikut:

- a. Bidang BPHTB dan BUMD
  - a. Aplikasi SIM BPHTB sudah dilaksanakan namun pada penerapannya masih memerlukan penyesuaian data base yang handal dan relevan dengan keadaan wajib pajak.
  - b. Terdapat perbedaan pemahaman antara petugas pelayanan dan wajib pajak tentang pajak BPHTB, Kurangnya SDM dan sarana-prasarana sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan;
  - c. SSPD-BPHTB dari Bank Jatim tidak sesuai dengan rekapitulasi yang ada di BAPENDA, pelaksanaan pembayaran di seluruh Cabang Bank Jatim dan lamanya proses pelaporan menyebabkan keterlambatan pelaporan ke BAPENDA;
  - d. Terdapat kesenjangan/perbedaan antara nilai pajak yang diajukan oleh wajib pajak dengan realita di lapangan.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Akan di adakan penyesuaian database yang handal dan tepat dalam aplikasi E-BPHTB oleh pihak ke 3.
- 2) Memberikan penjelasan kepada wajib pajak, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan,
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Jatim agar administrasi berkas sesuai rekapitulasi SSPD-BPHTB di BAPENDA dan pengiriman pelaporan yang tepat waktu;
- 4) Melakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan nilai kewajaran obyek di lapangan.

#### b. Bidang PBB

- 1) Keadaan Wajib Pajak PBB P2 yaitu jumlah Objek Pajak pada waktu pendaerahan PBB P2 tahun 2014 sebanyak 1.348.344, sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.378.158, sehingga ada kenaikan rata-rata per tahun sebanyak 7.453 Objek Pajak. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran beberapa Wajib Pajak atas pembayaran PBB P2, Nilai NJOP Bumi masih jauh dibawah harga pasar, dan masih ada 104 Desa yang belum mempunyai Basis Data (Sismiop).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi PBB-P2, meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, meningkatkan pontensi Pendapatan Daerah sektor PBB, dengan mempertimbangkan keadaan objek dan subjek pajak terkini, perlunya dilaksanakan kegiatan Pendataan dan Penilaian yang dilaksanakan melalui:

- 1) Pembentukan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data melalui pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 atau pihak lain yang ditentukan oleh Bidang PBB – P2;
- 2) Pemeliharaan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 sesuai Pasal 90

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan atau berdasarkan laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data.

- 3) Pembentukan dan pemeliharaan basis data objek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *uptodate* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi atau pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir maka basis data yang terbentuk perlu dipelihara dengan baik;
- 4) Berkurangnya Piutang PBB Hasil Pelimpahan dari Pusat.  
Dengan dialihkannya PBB - P2 menjadi pajak daerah maka seluruh piutang PBB-P2 yang tercatat di Ditjen Pajak diserahkan pula kepada Pemerintah Daerah. Dalam penyerahan data piutang PBB-P2 Ditjen Pajak mempunyai tanggung jawab untuk meyerahkan data dan saldo piutang yang seakurat mungkin. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *official assessment*. Pajak ditetapkan oleh fiskus melalui kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala. Saat pemungutan PBB-P2 masih dilakukan oleh Ditjen Pajak, dasar perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan keadaan objek terkini. Kesalahan lain yang ditemui adalah nama pemilik atau Wajib Pajak yang tercantum SPPT tidak sesuai dengan nama pemilik atau Wajib Pajak sebenarnya, objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ditemukan fisiknya, dan penerbitan SPPT ganda atas objek pajak yang sama dengan nama pemilik yang berbeda. Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, wajib pajak menjadi enggan.

c. Bidang PDRD

- 1) Kurang maksimalnya SDM yang ada di UPT dalam menggali potensi daerah;
- 2) Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak atau masyarakat mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat;
- 3) Pengelolaan pajak sudah terselenggara secara online namun belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat kabupaten malang, sehingga banyak yang kurang memahami;
- 4) Inovasi yang dijalankan secara online saat ini adalah SIPANJI, dalam pelaksanaan dilapangan masih sering terkendala dengan pembayaran melalui transfer yang membutuhkan waktu agak lama.
- 5) Luasnya kondisi geografis Kabupaten Malang sehingga data WP dan OP belum update dari desa-desa, mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak adalah sebagian tugas desa, nantinya desa akan menerima 10% dari penerimaan pajak;
- 6) Keterbatasan jumlah dan lokasi atm dan agen-agen Bank Jatim sebagai bank persepsi pembayaran pajak, sehingga menyulitkan WP membayar melalui bank lain;
- 7) Potensi pajak belum tergali maksimal, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut;
- 8) Ada tusi yang belum tertuang dalam tusi Bidang PDRD yaitu penyusunan target Pendapatan daerah sector retribusi, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sehingga perumusan target tidak maksimal. Belum ada subbid yang khusus menangani IT;
- 9) Kurangnya koordinasi dengan Dinas lain missal DPMPSTP;
- 10) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) belum tergali secara maksimal karena kewenangan bidang ESDM menjadi kewenangan Provinsi.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Memaksimalkan SDM UPT dalam menggali potensi pajak daerah dengan cara memberikan bimbingan teknis perpajakan sehingga penerimaan dari sektor pajak lebih meningkat lagi;
- 2) Memberikan penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak;
- 3) Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat kabupaten malang tentang sistem pelayanan pajak daerah secara online;

- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk dapat lebih cepat dalam pelayanan setor tunai;
- 5) Perlunya aplikasi yang dapat menunjang kemudahan penyampaian informasi Desa-desa untuk memberikan informasi Objek Pajak agar dilakukan pendataan
- 6) Perlunya peningkatan kerjasama dengan Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran yang lebih mendekatkan kepada masyarakat seperti Indomaret dan Alfamaret
- 7) Perlunya menghitung persis jumlah wp dan potensi penerimaan pajak
- 8) Bidang PDRD melakukan fungsi koordinasi untuk perumusan dan perencanaan target diluar Pajak Daerah
- 9) Perlunya integrasi sistem dengan Dinas Perijinan antara lain terkait Pajak Reklame
- 10) Membuat struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan dalam hal IT

#### d. Bidang P3O

- 1) Luasnya wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah wajib pajak yang belum didukung jumlah aparatur pemungut pajak dan tidak adanya ASN Fungsional Juru Sita sebagai bagian dari Penindakan;
- 2) Banyaknya pergantian domisili wajib pajak serta kepemilikan tempat pengenaan pajak yang berada di luar Kabupaten Malang;
- 3) Terdapat obyek pajak yang masih belum dilegalitaskan melalui porforasi pajak;
- 4) Kurang optimalnya konektifitas database Bidang PDRD dengan P3O atau belum adanya sistem aplikasi yang memudahkan monitoring tunggakansehingga data tunggakan tidak *Realtime* / terkini, termasuk data tunggakan pajak yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis;
- 5) Surat permohonan keringanan dari wajib pajak terlalu berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan;

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

- 1) Meningkatkankepatuhan pada Wajib Pajak dalam pelunasan pembayaran sehingga perolehan Pajak Daerah pada 9 (sembilan) Obyek Pajak akan meningkat;

- 2) Terlaksananya penanganan pajak secara intensif di lapangan dan upaya penambahan Wajib Pajak serta Obyek Pajak baru;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menentukan Nilai Wajar dalam penentuan besaran keringanan Pajak.

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada sub bab ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan analisis kebutuhan Tahun 2020, alasan dan catatan penting perbedaan seperti terlihat pada **tabel 2.3** dibawah ini:

Tabel 2.3

## Reviu Rancangan Awal Tahun 2020

## Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Malang

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan operasional perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8,940,677,211.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8,940,677,211.00</b>	
1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12.000 buah	119,940,000.00	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12.000 buah	119,940,000.00	
2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	173,160,000.00	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	173,160,000.00	



3	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	4126 OB	6,709,356,781.00	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	4126 OB	6,709,356,781.00
4	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75 jenis	400,077,000.00	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75 jenis	400,077,000.00
5	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	57 jenis	325,992,800.00	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	57 jenis	325,992,800.00
6	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	51 jenis	90,246,800.00	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	51 jenis	90,246,800.00
7	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	126,720,000.00	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	126,720,000.00
8	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	16 jenis	100,861,000.00	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	16 jenis	100,861,000.00
9	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9900 HOK	210,097,500.00	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9900 HOK	210,097,500.00

10	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	850 HOK	434,005,330.00	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	850 HOK	434,005,330.00
11	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	867 HOK	250,220,000.00	12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	867 HOK	250,220,000.00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,525,900,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,525,900,000.00</b>
1	12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 jenis	253,458,500.00	13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 jenis	253,458,500.00
2	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 jenis	446,720,694.00	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 jenis	446,720,694.00
3	14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	173 unit	404,539,000.00	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	173 unit	404,539,000.00

4	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	55,673,000.00	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	55,673,000.00	
5	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	27,215,000.00	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	27,215,000.00	
6	17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 baru yang diadakan (unit)	2 unit	78,279,306.00	18. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 baru yang diadakan (unit)	2 unit	78,279,306.00	
		Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 baru yang diadakan (unit)	0 unit	0		Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 baru yang diadakan (unit)	0 unit	0	
7	18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	6 jenis	260,014,500.00	19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	6 jenis	260,014,500.00	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>173,250,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>173,250,000.00</b>	
1	19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	0 stell	-	18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	0 stell	-	

2	20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (stell)	525 stell	173,250,000.00	21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (stell)	525 stell	173,250,000.00	
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>56,450,000.00</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>56,450,000.00</b>	
1	21. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	193 orang	56,450,000.00	19. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	193 orang	56,450,000.00	
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>32,350,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Presentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>32,350,000.00</b>	
1	22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	70 buku	16,625,000.00	20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	70 buku	16,625,000.00	
2	23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 buku	11,160,000.00	21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 buku	11,160,000.00	
3	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	4,565,000.00	22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	4,565,000.00	

<b>VI</b>	<b>Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan BPHTB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>2,781,250,361.00</b>	<b>Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan BPHTB</b>	Badan Pendapatan Daerah	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>2,781,250,361.00</b>
1	25. Pelayanan dan Penelitian BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	jumlah validasi dan penelitian BPHTB	100%	1,251,563,361.00	23. Pelayanan dan Penelitian BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	jumlah validasi dan penelitian BPHTB	100%	1,251,563,361.00
2	26. Pembukuan BPHTB dan BUMD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pembukuan BPHTB dan BUMD	13 buku	417,187,000.00	24. Pembukuan BPHTB dan BUMD	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pembukuan BPHTB dan BUMD	13 buku	417,187,000.00
3	27. Verifikasi dan Validasi	Badan Pendapatan Daerah	Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	1,112,500,000.00	25. Verifikasi dan Validasi	Badan Pendapatan Daerah	Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	1,112,500,000.00
<b>VII</b>	<b>Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan PBB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>	<b>100%</b>	<b>6,926,419,016.00</b>	<b>Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan PBB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>	<b>100%</b>	<b>6,926,419,016.00</b>
1	28. Optimalisasi penerimaan PBB-P2	Badan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan PBB - P2	100%	2,431,920,669.00	26. Optimalisasi penerimaan PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Persentase penerimaan PBB - P2	100%	2,431,920,669.00
2	29. Pencetakan massal dan individual SPPT PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penerbitan SPPT PBB - P2	1441746 Objek Pajak	1,154,838,826.00	27. Pencetakan massal dan individual SPPT PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penerbitan SPPT PBB - P2	1441746 Objek Pajak	1,154,838,826.00

3	30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	248 Desa	755,100,693.00	28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	248 Desa	755,100,693.00
4	31. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2	1 Aplikasi SIM PBB	1,085,338,431.00	29. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2	1 Aplikasi SIM PBB	1,085,338,431.00
5	32. Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan	1158380 OP	421,027,400.00	30. Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan	1158380 OP	421,027,400.00
6	33. Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	67 Desa	1,078,192,997.00	31. Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	67 Desa	1,078,192,997.00

<b>VII I</b>	<b>Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,659,756,314.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,659,756,314.00</b>	
1	34. Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih	14 Sektor Pajak	922,223,000.00	32. Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih	14 Sektor Pajak	922,223,000.00	
2	35. Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah	27 kali	809,881,000.00	33. Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pajak Daerah	27 kali	809,881,000.00	
3	36. Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat	0 kali	0	34. Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat	0 kali	0	
4	37. Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	26 WP	455,456,314.00	35. Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	26 WP	455,456,314.00	
5	38. Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah operasi gabungan yang dilakukan	18 Kegiatan	612,006,000.00	36. Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah operasi gabungan yang dilakukan	18 Kegiatan	612,006,000.00	
6	39. Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	14 Kegiatan	508,636,000.00	37. Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	14 Kegiatan	508,636,000.00	

7	40. Rekonsiliasi Piutang Pajak	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT	11 Kegiatan	351,554,000.00	38. Rekonsiliasi Piutang Pajak	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT	11 Kegiatan	351,554,000.00	
<b>IX</b>	<b>Program Pelayanan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>3,710,485,980.00</b>	<b>Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>3,710,485,980.00</b>	
1	41. Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15.800 SKPD	1,399,508,685.00	39. Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15.800 SKPD	1,399,508,685.00	
2	42. Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi	510 Desa	344,524,000.00	40. Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi	510 Desa	344,524,000.00	
3	43. Penyusunan target dan laporan perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi yang disusun	295 laporan	416,039,100.00	41. Penyusunan target dan laporan perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan realisasi yang disusun	295 laporan	416,039,100.00	



4	44. Pelayanan dan pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah permintaan perforasi dan pengadministrasian pengelolaan benda - benda berharga	336 Wajib Pajak	288,381,947.00	42. Pelayanan dan pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah permintaan perforasi dan pengadministrasian pengelolaan benda - benda berharga	336 Wajib Pajak	288,381,947.00	
5	45. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	99 Obyek Pajak	648,977,748.00	43. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	99 Obyek Pajak	648,977,748.00	
6	46. Pendaftaran pendataan dan pemutakhiran data obyek pajak	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	256 Wajib Pajak	613,054,500.00	44. Pendaftaran pendataan dan pemutakhiran data obyek pajak	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	256 Wajib Pajak	613,054,500.00	
7	47. Penyusunan regulasi perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang dihasilkan	0 Dokumen	0	57. Penyusunan regulasi perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang dihasilkan	0 Dokumen	0	
<b>Total</b>					<b>27,806,538,882.00</b>	<b>Total</b>					<b>27,806,538,882.00</b>

Dari Tabel 2.3 di atas dapat kita ketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sama dengan program dan kegiatan tahun 2019. Artinya adalah ada kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020. Target yang telah ditetapkan di awal Renstra dibreakdown menjadi target setiap tahun serta selalu dievaluasi capaiannya.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang belum ada usulan ( NIHIL ) program atau kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang bersifat fisik hal ini dapat di lihat dalam tabel Usulan Program dan Kegiatan seperti yang tertera pada **tabel 2.4** dibawah ini:

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**

**Kabupaten Malang**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>N I H I L</b>				

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mengacu kepada kebijakan nasional bagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Namun permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah potensi dan wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi pajak daerah secara optimal dan percepatan dalam pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah. Perlu upaya terus menerus intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, optimalisasi teknologi informasi yang ada serta adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pajak daerah.

Disamping itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai, belum optimalnya dan terbatasnya personil dalam penggalian sumber sumber pendapatan baru dan pemungut potensi sumber sumber pendapatan dikarenakan kurang sarana kerja dan luasnya wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pembinaan aparatur pemungut pajak melalui bimtek

Arah kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, diarahkan kepada:
- Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
  - Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun infrastruktur teknologi dan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan *on line* dengan pihak perbankan
  - Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**  
**KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>27.806.538.882,00</b>				<b>28.208.630.712,00</b>
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>27.806.538.882,00</b>				<b>28.208.630.712,00</b>
<b>4.402</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>27.806.538.882,00</b>				<b>28.208.630.712,00</b>
<b>4.402.29</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				<b>27.806.538.882,00</b>				<b>28.208.630.712,00</b>
<b>4.402.29.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>8.940.677.211,00</b>			<b>100%</b>	<b>8.940.677.211,00</b>
4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Badan Pendapatan Daerah	8500 buah	119.940.000,00	APBD Kabupaten		8500 buah	119.940.000,00
4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Badan Pendapatan Daerah	12 bulan	173.160.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	173.160.000,00
4.402.29.01.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Badan Pendapatan Daerah	57 jenis	325.992.800,00	APBD Kabupaten		57 jenis	325.992.800,00
4.402.29.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	Badan Pendapatan Daerah	12585 HOK	210.097.500,00	APBD Kabupaten		12585 HOK	210.097.500,00

		(HOK)							
4.402.29.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Badan Pendapatan Daerah	7032 OB	6.709.356.781,00	APBD Kabupaten		7032 OB	6.709.356.781,00
4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Badan Pendapatan Daerah	768 HOK	250.220.000,00	APBD Kabupaten		768 HOK	250.220.000,00
4.402.29.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	11 jenis	100.861.000,00	APBD Kabupaten		11 jenis	100.861.000,00
4.402.29.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Badan Pendapatan Daerah	75 jenis	400.077.000,00	APBD Kabupaten		75 jenis	400.077.000,00
4.402.29.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Badan Pendapatan Daerah	568 HOK	434.005.330,00	APBD Kabupaten		568 HOK	434.005.330,00
4.402.29.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	2 jenis	126.720.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	126.720.000,00
4.402.29.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Badan Pendapatan Daerah	40 jenis	90.246.800,00	APBD Kabupaten		40 jenis	90.246.800,00
<b>4.402.29.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>1.525.900.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>1.927.991.830,00</b>

4.402.29.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Badan Pendapatan Daerah	5 jenis	446.720.694,00	APBD Kabupaten		4 jenis	225.000.000,00
4.402.29.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Badan Pendapatan Daerah	309 unit	404.539.000,00	APBD Kabupaten		309 unit	404.539.000,00
4.402.29.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	7 jenis	55.673.000,00	APBD Kabupaten		7 jenis	55.673.000,00
4.402.29.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Badan Pendapatan Daerah	12 jenis	27.215.000,00	APBD Kabupaten		12 jenis	27.215.000,00
4.402.29.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Badan Pendapatan Daerah	7 jenis	253.458.500,00	APBD Kabupaten		7 jenis	253.458.500,00
4.402.29.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2 unit	78.279.306,00	APBD Kabupaten	Tahun 2021 pengadaan kendaraan roda 4	3 unit	702.091.830,00
4.402.29.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6 jenis	260.014.500,00	APBD Kabupaten		6 jenis	260.014.500,00
<b>4.402.29.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>173.250.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>173.250.000,00</b>
4.402.29.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	350 stel	173.250.000,00	APBD Kabupaten		350 stel	173.250.000,00
<b>4.402.29.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>		<b>100%</b>	<b>56.450.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>56.450.000,00</b>



4.402.29.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	Badan Pendapatan Daerah	100 orang	56.450.000,00	APBD Kabupaten		100 orang	56.450.000,00
<b>4.402.29.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>32.350.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>32.350.000,00</b>
4.402.29.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Badan Pendapatan Daerah	48 buku	16.625.000,00	APBD Kabupaten		48 buku	16.625.000,00
4.402.29.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Badan Pendapatan Daerah	4 buku	11.160.000,00	APBD Kabupaten		4 buku	11.160.000,00
4.402.29.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Badan Pendapatan daerah	1 buku	4.565.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	4.565.000,00
<b>4.402.29.06</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD</b>	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>		<b>100%</b>	<b>2.781.250.361,00</b>			<b>100%</b>	<b>2.781.250.361,00</b>
4.402.29.06.01	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti	Badan Pendapatan Daerah	100%	1.251.563.361,00	APBD Kabupaten		100%	1.251.563.361,00
4.402.29.06.02	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi	Badan Pendapatan Daerah	100%	1.112.500.000,00	APBD Kabupaten		100%	1.112.500.000,00

4.402.29.06.03	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	Badan Pendapatan Daerah	27 buku	417.187.000,00	APBD Kabupaten		27 buku	417.187.000,00
<b>4.402.29.07</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>		<b>100%</b>	<b>6.926.419.016,00</b>			<b>100%</b>	<b>6.926.419.016,00</b>
4.402.29.07.01	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	100%	2.431.920.669,00	APBD Kabupaten		100%	2.431.920.669,00
4.402.29.07.02	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	1392226 op	1.154.838.826,00	APBD Kabupaten		1392226 op	1.154.838.826,00
4.402.29.07.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	Badan Pendapatan Daerah	390 Desa	755.100.693,00	APBD Kabupaten		390 Desa	755.100.693,00
4.402.29.07.04	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	Badan Pendapatan Daerah	1 aplikasi SIM PBB	1.085.338.431,00	APBD Kabupaten		1 aplikasi SIM PBB	1.085.338.431,00
4.402.29.07.05	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	~ Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	Badan Pendapatan Daerah	1519390 op	421.027.400,00	APBD Kabupaten		1519390 op	421.027.400,00
4.402.29.07.06	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	~ Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan	Badan Pendapatan Daerah	33 desa	1.078.192.997,00	APBD Kabupaten		33 desa	1.078.192.997,00

		pemeliharaan Basis data							
<b>4.402.29.08</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3.659.756.314,00</b>			<b>100%</b>	<b>3.659.756.314,00</b>
4.402.29.08.01	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	Badan Pendapatan Daerah	10 sektor pajak	922.223.000,00	APBD Kabupaten		10 sektor pajak	922.223.000,00
4.402.29.08.03	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	Badan Pendapatan Daerah	28 WP	455.456.314,00	APBD Kabupaten		28 WP	455.456.314,00
4.402.29.08.04	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	Badan Pendapatan Daerah	14 kegiatan	612.006.000,00	APBD Kabupaten		14 kegiatan	612.006.000,00
4.402.29.08.05	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	Badan Pendapatan Daerah	14 kegiatan	508.636.000,00	APBD Kabupaten		14 kegiatan	508.636.000,00
4.402.29.08.06	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	Badan Pendapatan Daerah	12 kegiatan	351.554.000,00	APBD Kabupaten		12 kegiatan	351.554.000,00
4.402.29.08.07	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	19 dokumen	809.881.000,00	APBD Kabupaten		19 dokumen	809.881.000,00
<b>4.402.29.09</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>		<b>100%</b>	<b>3.710.485.980,00</b>			<b>100%</b>	<b>3.710.485.980,00</b>

4.402.29.09.01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	Badan Pendapatan Daerah	15800 SKPD	1.399.508.685,00	APBD Kabupaten		15800 SKPD	1.399.508.685,00
4.402.29.09.02	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah	378 desa	344.524.000,00	APBD Kabupaten		378 desa	344.524.000,00
4.402.29.09.03	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	Badan Pendapatan Daerah	216 laporan	416.039.100,00	APBD Kabupaten		216 laporan	416.039.100,00
4.402.29.09.04	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	Badan Pendapatan Daerah	336 wajib pajak	288.381.947,00	APBD Kabupaten		336 wajib pajak	288.381.947,00
4.402.29.09.05	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten	Badan Pendapatan Daerah	122 OP	648.977.748,00	APBD Kabupaten		122 OP	648.977.748,00
4.402.29.09.06	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	Badan Pendapatan Daerah	300 WP	613.054.500,00	APBD Kabupaten		300 WP	613.054.500,00

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi. **Tujuan** Badan Pendapatan Daerah sesuai Perubahan Renstra tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. **Sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan misi, adalah “Peningkatan pendapatan asli daerah guna kemandirian daerah”.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 9 program dan 48 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan:
  - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
  - c) Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor
  - d) Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan;
  - e) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - f) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

- g) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
  - h) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
  - i) Kegiatan Penyediaan ATK
  - j) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
  - k) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - l) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang – undangan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan :
- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  - b) Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
  - c) Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan gedung kantor
  - d) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
  - e) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :
- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :
- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan :
- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  - c) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD terdiri dari 3 kegiatan :
- a) Kegiatan Pelayanan dan penelitian BPHTB
  - b) Kegiatan Pembukuan BPHTB dan BUMD
  - c) Kegiatan Verifikasi dan Validasi
- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari 6 kegiatan :
- a) Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB - P2

- b) Kegiatan Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2
  - c) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2
  - d) Kegiatan Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2
  - e) Kegiatan Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2
  - f) Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah terdiri dari 6 kegiatan:
- a) Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB
  - b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
  - c) Kegiatan Penanganan Keberatan dan Pengurangan
  - d) Kegiatan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah
  - e) Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
  - f) Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak
- 9) Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB terdiri dari 6 kegiatan :
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan
  - b) Kegiatan Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa
  - c) Kegiatan Penyusunan target dan laporan perpajakan
  - d) Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga
  - e) Kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah
  - f) Kegiatan Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan Nasional, Provinsi, Kota atau Kabupaten pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah termasuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 termuat dalam Kegiatan Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB-P2 dan Kegiatan Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa (GPA terlampir).



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat kewenangan urusan penunjang keuangan. Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2020. Program dan Kegiatan tahun 2020 sesuai Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2021 dan pendanaan indikatif tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8			
4	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
4	<b>Keuangan</b>									
4	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional perkantoran</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8,940,677,211</b>	<b>APBD</b>				
4	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	SEKRETARIAT	12.000 buah	119,940,000	APBD	
4	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum / air bersih, telekomunikasi & internet	SEKRETARIAT	12 bulan	173,160,000	APBD	
4	2	1	4	Penyediaan barang Cetak & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yg disediakan	SEKRETARIAT	57 jenis	325,992,800	APBD	
4	2	1	5	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat & tamu yang disediakan	SEKRETARIAT	9900 (HOK)	210,097,500	APBD	
4	2	1	6	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	SEKRETARIAT	4128 (OB)	6,709,356,781	APBD	
4	2	1	7	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	SEKRETARIAT	867 (HOK)	250,220,000	APBD	

4	2	1	8	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg disediakan	SEKRETARIAT	16 jenis	100,861,000	APBD	
4	2	1	9	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yg disediakan	SEKRETARIAT	75 jenis	400,077,000	APBD	
4	2	1	10	Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	SEKRETARIAT	850 (HOK)	434,005,330	APBD	
4	2	1	11	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen alat - alat listrik & elektronik	SEKRETARIAT	51 jenis	90,246,800	APBD	
4	2	1	12	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang - undangan yg disediakan	SEKRETARIAT	2 jenis	126,720,000	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana &amp; prasarana penunjang aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,525,900,000</b>	<b>APBD</b>	
4	2	2	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	SEKRETARIAT	5 jenis	446,720,694	APBD	
4	2	2	2	Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan R4 & kendaraan R2 dinas yg dipelihara rutin & berkala	SEKRETARIAT	173 unit	404,539,000	APBD	
4	2	2	3	Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	SEKRETARIAT	7 jenis	55,673,000	APBD	
4	2	2	4	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yg dipelihara rutin / berkala	SEKRETARIAT	12 jenis	27,215,000	APBD	
4	2	2	5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg diadakan	SEKRETARIAT	2 jenis	253,458,500	APBD	

4	2	2	6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional Roda 2 yang diadakan	SEKRETARIAT	2 unit	78,279,306	APBD	
					Jumlah kendaraan dinas/Operasional Roda 4 yang diadakan	SEKRETARIAT	0 unit	0	APBD	
4	2	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	SEKRETARIAT	6 jenis	260,014,500	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase penunjang kerja aparatur</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>173,250,000</b>	<b>APBD</b>	
4	2	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	SEKRETARIAT	525 stell	173,250,000	<b>APBD</b>	
4	2	3	2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Olah Raga yang disediakan	SEKRETARIAT	0 stell	0	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>56,450,000</b>	<b>APBD</b>	
4	2	4	1	Pendidikan & Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal	SEKRETARIAT	193 orang	56,450,000	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan &amp; kinerja Perangkat Daerah yg tepat waktu</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>110 buku</b>	<b>32,350,000</b>	<b>APBD</b>	
4	2	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan	SEKRETARIAT	70 buku	16,625,000	APBD	

4	2	5	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I & II	SEKRETARIAT	3 buku	11,160,000	APBD	
4	2	5	3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir	SEKRETARIAT	1 buku	4,565,000	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD</b>	<b>Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,781,250,361</b>	<b>APBD</b>	
4	2	6	1	Pelayanan dan penelitian BPHTB	Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani	Bidang BPHTB & BUMD	100%	1,251,563,361	APBD	
4	2	6	2	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD	Bidang BPHTB & BUMD	13 buku	417,187,000	APBD	
4	2	6	3	Verifikasi dan Validasi	Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	Bidang BPHTB & BUMD	100%	1,112,500,000	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>Tingkat layanan PBB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.760 OP</b>	<b>6,926,419,016</b>	<b>APBD</b>	
4	2	7	1	Optimalisasi Penerimaan PBB - P2	Persentase penerimaan PBB - P2	Bidang PBB - P2	100%	2,431,920,669	APBD	
4	2	7	2	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB - P2	Bidang PBB - P2	1441746OP	1,154,838,826	APBD	

4	2	7	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun	Bidang PBB - P2	248 Desa	755,100,693	APBD	
4	2	7	4	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2	Bidang PBB - P2	1 Aplikasi SIM PBB	1,085,338,431	APBD	
4	2	7	5	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan	Bidang PBB - P2	1158380 op	421,027,400	APBD	
4	2	7	6	Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	Bidang PBB - P2	67 Desa	1,078,192,997	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,659,756,314</b>	<b>APBD</b>	
4	2	8	1	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih	Bidang P3O	14 sektor pajak daerah	922,223,000	APBD	
4	2	8	2	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan	Bidang P3O	27 dokumen	809,881,000	APBD	
4	2	8	3	Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat	Bidang P3O	0 kali	0	APBD	

4	2	8	4	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	Bidang P3O	28 WP	455,456,314	APBD	
4	2	8	5	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan operasi gabungan yang dilakukan	Bidang P3O	18 kegiatan	612,006,000	APBD	
4	2	8	6	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	Bidang P3O	14 kegiatan	508,636,000	APBD	
4	2	8	7	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT	Bidang P3O	11 kegiatan	351,554,000	APBD	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB &amp; BPHTB</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,710,485,980</b>	<b>APBD</b>	
4	2	9	1	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	Bidang PDRD	15.800 SKPD	1,399,508,685	APBD	
4	2	9	2	Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	Bidang PDRD	510 Desa	344,524,000	APBD	
4	2	9	3	Penyusunan target dan laporan perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	Bidang PDRD	395 laporan	416,039,100	APBD	
4	2	9	4	Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda - Benda Berharga	Bidang PDRD	336 Wajib Pajak	288,381,947	APBD	

4	2	9	5	Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi	Bidang PDRD	99 OP	648,977,748	APBD	
4	2	9	6	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	Bidang PDRD	256 Wajib Pajak	613,054,500	APBD	
4	2	9	7	Penyusunan Regulasi Perpajakan	Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang di hasilkan	Bidang PDRD	0 dokumen	0	APBD	
				<b>JUMLAH</b>				<b>27,806,538,882</b>		



**TABEL 4.2**

**Rencana Kerja, Pendanaan dan target Penyerapan**

**Anggaran Per Triwulan**

**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020**

No	URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2010		Target kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	TW I		TW II		TW III		TW IV		
					Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>27,806,538,882.00</b>	<b>14.34</b>	<b>10.74</b>	<b>31.42</b>	<b>23.45</b>	<b>31.88</b>	<b>27.44</b>	<b>22.35</b>	<b>38.37</b>	
	<b>KEUANGAN</b>			<b>27,806,538,882.00</b>	<b>14.34</b>	<b>10.74</b>	<b>31.42</b>	<b>23.45</b>	<b>31.88</b>	<b>27.44</b>	<b>22.35</b>	<b>38.37</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,447,796,783.00</b>	<b>19.95</b>	<b>14.82%</b>	<b>19.54</b>	<b>24.18%</b>	<b>30.32</b>	<b>33.70%</b>	<b>30.19</b>	<b>27.30%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	251,550,000.00	10.00	10.19%	26.88	6.17%	33.75	42.47%	29.38	41.17%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	302,400,000.00	25.00	12.23%	25.00	20.26%	25.00	41.63%	25.00	25.88%	

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	57 jenis	355,887,800.00	22.97	22.19%	25.41	24.55%	24.49	28.82%	27.14	24.44%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12585 HOK	223,200,000.00	25.00	20.11%	25.00	31.87%	25.00	30.69%	25.00	17.33%	
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7032 OB	6,793,760,400.00	30.12	15.87%	2.41	21.33%	28.92	35.77%	38.55	27.03%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	768 HOK	315,577,750.00	22.39	16.61%	32.84	43.20%	44.78	40.20%	0.00	0.00%	
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	11 jenis	74,960,000.00	25.00	10.00%	25.00	20.20%	25.00	26.53%	25.00	43.27%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75 jenis	400,077,000.00	33.33	20.26%	33.33	33.20%	0.00	22.01%	33.33	24.53%	
Penyediaan Makan Dan Minum	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	568 HOK	483,417,000.00	11.35	13.83%	10.45	12.73%	38.92	47.42%	39.28	26.02%	
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	126,720,000.00	-	10.00%	0.00	25.40%	41.60	27.01%	58.40	37.59%	

	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 jenis	120,246,833.00	14.30	11.77%	8.61	27.05%	46.08	28.12%	31.01	33.06%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,021,785,956.00</b>	<b>4.71</b>	<b>2.43%</b>	<b>33.52</b>	<b>37.73%</b>	<b>21.63</b>	<b>31.33%</b>	<b>40.13</b>	<b>28.51%</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 jenis	211,083,759.00	-	0.00%	14.89	65.16%	0.00	10.05%	85.11	24.79%	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	309 unit	450,722,197.00	-	0.00%	0.00	0.00%	45.45	44.25%	54.55	55.75%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	91,000,000.00	-	0.00%	21.43	30.82%	21.43	48.85%	57.14	20.32%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	49,980,000.00	21.43	11.80%	50.00	28.91%	21.43	26.68%	7.14	32.61%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	7 jenis	31,400,000.00	11.56	5.18%	28.32	19.20%	23.12	49.49%	36.99	26.13%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	2 unit	78,600,000.00	-	0.00%	100.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

		(Unit)											
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	6 jenis	109,000,000.00	-	0.00%	20.00	20.00%	40.00	40.00%	40.00	40.00%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>124,827,472.00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	<b>0.00%</b>	<b>0%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	350 stel	124,827,472.00	-	0%	100	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	350 stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>58,136,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	<b>0%</b>	<b>0.00%</b>	
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	100 orang	58,136,000.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>76,081,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>33.33</b>	<b>26.61%</b>	<b>25.00</b>	<b>48.12%</b>	<b>41.67</b>	<b>25.27%</b>	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	48 buku	23,976,000.00	-	0.00%	50	25.00%	25	60.59%	25	14.41%	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 buku	22,020,000.00	-	0.00%	50	54.84%	50	34.41%	0	10.75%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	30,085,000.00	-	0.00%	0	0.00%	0	49.35%	100	50.65%	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD</b>	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>2,781,250,361.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10.89%</b>	<b>25.00</b>	<b>18.32%</b>	<b>25.00</b>	<b>18.52%</b>	<b>25.00</b>	<b>52.27%</b>	
	Pelayanan Dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti	100%	1,067,654,911.00	25.00	11.03%	25.00	24.09%	25.00	19.84%	25.00	45.04%	
	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	100%	1,206,671,200.00	25.00	10.48%	25.00	17.52%	25.00	15.01%	25.00	56.99%	

	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	27 buku	506,924,250.00	25.00	11.17%	25.00	13.35%	25.00	20.70%	25.00	54.78%	
7	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>	<b>100%</b>	<b>6,926,419,016.00</b>	<b>36.08</b>	<b>8.89%</b>	<b>17.25</b>	<b>21.90%</b>	<b>30.00</b>	<b>26.49%</b>	<b>16.67</b>	<b>42.71%</b>	
	Optimalisasi Penerimaan PBB - P2	Persentase Penerimaan PBB P2	100%	2,431,920,669.00	6.50	7.98%	13.50	45.73%	60.00	13.33%	20.00	32.96%	
	Pencetakan Massal Dan Individual SPPT PBB - P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	1392226 op	1,154,838,826.00	85.00	20.49%	5.00	42.80%	5.00	19.77%	5.00	16.94%	
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	390 Desa	755,100,693.00	10.00	2.88%	30.00	5.81%	50.00	22.93%	10.00	68.38%	
	Pengelolaan Data Base Objek Dan Subjek PBB - P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	1 aplikasi SIM PBB	1,085,338,431.00	-	0.00%	20.00	9.76%	40.00	47.20%	40.00	43.04%	
	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT	1519390 op	421,027,400.00	90.00	20.07%	10.00	25.67%	-	42.78%	-	11.47%	

	PBB - P2	PBB P2 yang didistribusikan											
	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	33 desa	1,078,192,997.00	25.00	1.92%	25.00	1.66%	25.00	12.95%	25.00	83.47%	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,659,756,314.00</b>	<b>21.67</b>	<b>9.84%</b>	<b>28.33</b>	<b>23.07%</b>	<b>26.67</b>	<b>24.66%</b>	<b>23.33</b>	<b>42.43%</b>	
	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	10 sektor pajak	922,223,000.00	25.00	10.41%	25.00	23.01%	25.00	34.12%	25.00	32.46%	
	Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	28 WP	455,456,314.00	25.00	8.27%	25.00	20.12%	25.00	38.98%	25.00	32.62%	
	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	14 kegiatan	612,006,000.00	25.00	3.05%	25.00	28.04%	25.00	11.16%	25.00	57.75%	
	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	14 kegiatan	508,636,000.00	25.00	13.07%	25.00	19.74%	25.00	22.47%	25.00	44.73%	
	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	351,554,000.00	15.00	11.54%	35.00	24.55%	30.00	22.80%	20.00	41.11%	

	Rekonsialisasi Piutang Pajak	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	809,881,000.00	15.00	12.67%	35.00	22.97%	30.00	18.45%	20.00	45.91%	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN DAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>3,710,485,980.00</b>	<b>21.67</b>	<b>7.61%</b>	<b>25.83</b>	<b>25.49%</b>	<b>28.33</b>	<b>19.10%</b>	<b>24.17</b>	<b>47.81%</b>	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15800 SKPD	1,399,508,685.00	20.00	5.67%	25.00	18.32%	30.00	23.18%	25.00	52.84%	
	Pendaftaran Pendataan Dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	344,524,000.00	10.00	8.04%	30.00	23.86%	40.00	21.30%	20.00	46.81%	
	Penyusunan Data Penghitungan Dan Rekonsialisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah Laporan Realisasi yang disusun	216 laporan	416,039,100.00	25.00	8.86%	25.00	55.70%	25.00	13.25%	25.00	22.18%	
	Penyusunan Target Dan Laporan Perpajakan	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	336 wajib pajak	288,381,947.00	25.00	9.65%	25.00	19.61%	25.00	19.62%	25.00	51.12%	



	Pelayanan Dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda Berharga	jumlah obyek pajak yang dilakukan inten dan eksten	122 OP	648,977,748.00	25.00	11.11%	25.00	29.86%	25.00	25.86%	25.00	33.17%	
	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	300 WP	613,054,500.00	25.00	2.32%	25.00	5.56%	25.00	11.40%	25.00	80.72%	
	<b>Jumlah</b>			<b>27,806,538,882.00</b>	<b>14.34</b>	<b>10.74</b>	<b>31.42</b>	<b>23.45</b>	<b>31.88</b>	<b>27.44</b>	<b>22.35</b>	<b>38.37</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik Tahun 2020, serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan atau pekerjaan tersebut akan dianggarkan kembali pada Tahun 2021.

Implementasi Rencana Kerja sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**